



Manajemen Kehumasan

Biro Humas,
Hukum dan
Kerja sama



DASAR HUKUM

- Keputusan Menkumham Nomor M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kemenkumham
- Pedoman Menkumham Nomor M.HH-02.HH.01.03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Kemenkumham



setjen.kemenkumham.go.id

TUJUAN KEHUMASAN

- Memberikan **pelayanan informasi** kepada publik secara **cepat, tepat, dan mudah dipahami**;
- **Menciptakan opini publik yang positif** terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- **Mengidentifikasi perspektif dan dinamika masyarakat** sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
- **Mengelola opini publik dan tanggap akan situasi krisis** yang berkembang





“

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.”

Warren Buffett

RUANG LINGKUP



**Manajemen
Pemberitaan**



**Manajemen
Iklan**



**Manajamen
Pemantauan
Media**



**Manajamen
Komunikasi Krisis**



**Manajamen
Media Sosial**

Manajemen Pemberitaan

Biro Humas, Hukum dan Kerja sama



MANAJEMEN PEMBERITAAN



- 1** Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis agar melakukan amplifikasi dan glorifikasi pemberitaan mengenai capaian kinerja masing-masing
- 2** Pemberitaan dapat dilakukan melalui metode rilis atau siaran/keterangan pers, konferensi pers, door stop maupun teknik dan metode komunikasi lain dengan memperhatikan kode etik jurnalistik yang berlaku
- 3** Pemberitaan dilakukan di media mainstream baik cetak, elektronik maupun online (Tier 1 dan Tier 2) sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.HH.0405 Tahun 2023 (telah divalidasi Dewan Pers dan terindeks Google)

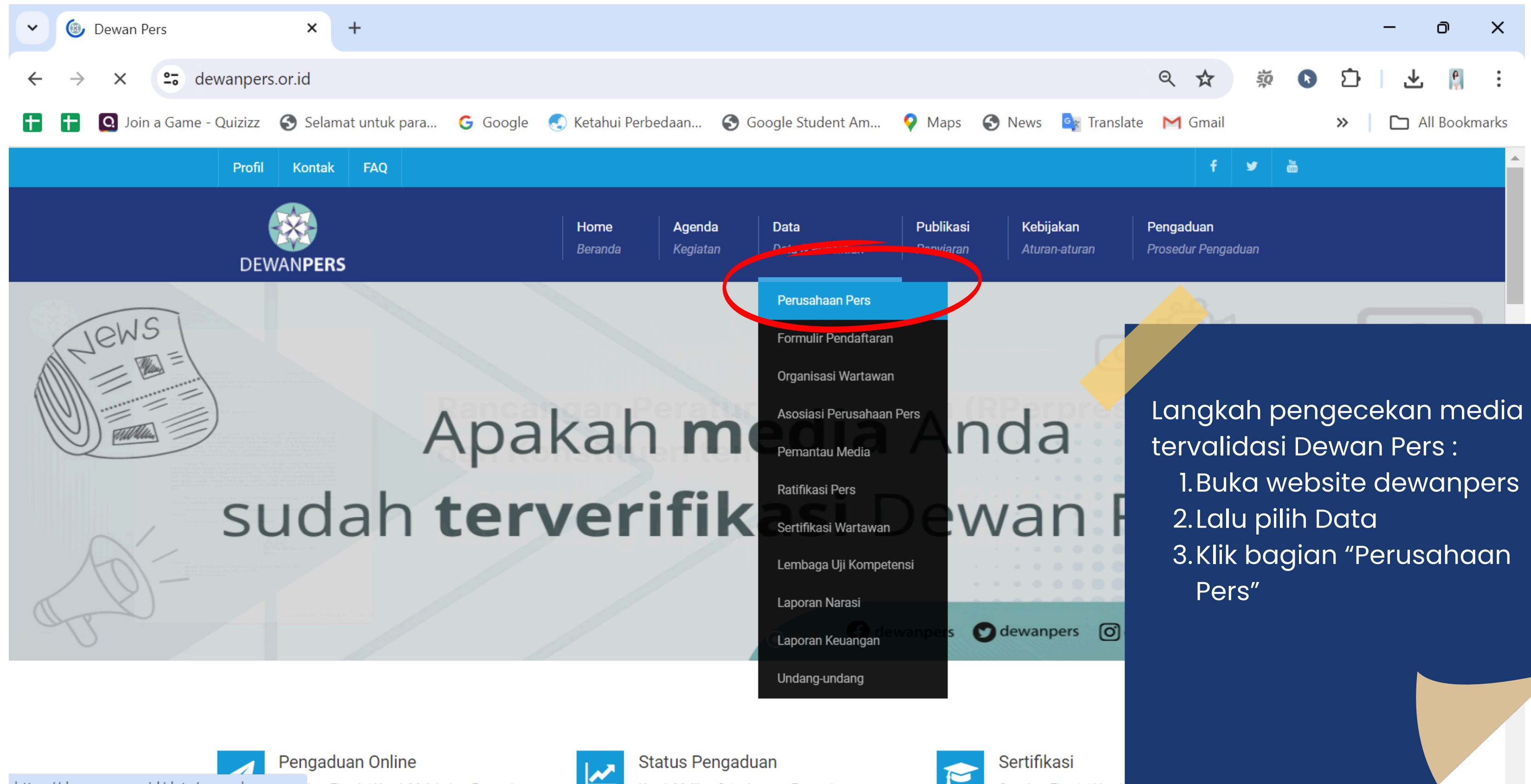
KETENTUAN MEDIA

Humas memprioritaskan media massa, baik cetak, elektronik maupun siber yang memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

1. Telah terverifikasi oleh Dewan Pers
2. Memiliki Search Engine Optimization (SEO)
3. Memiliki web traffic yang tinggi
4. Rubrikasi media
5. Konvergensi media
6. Oplah media cetak
7. Segmentasi pasar



Cara Mengecek Media Tervalidasi Dewan Pers

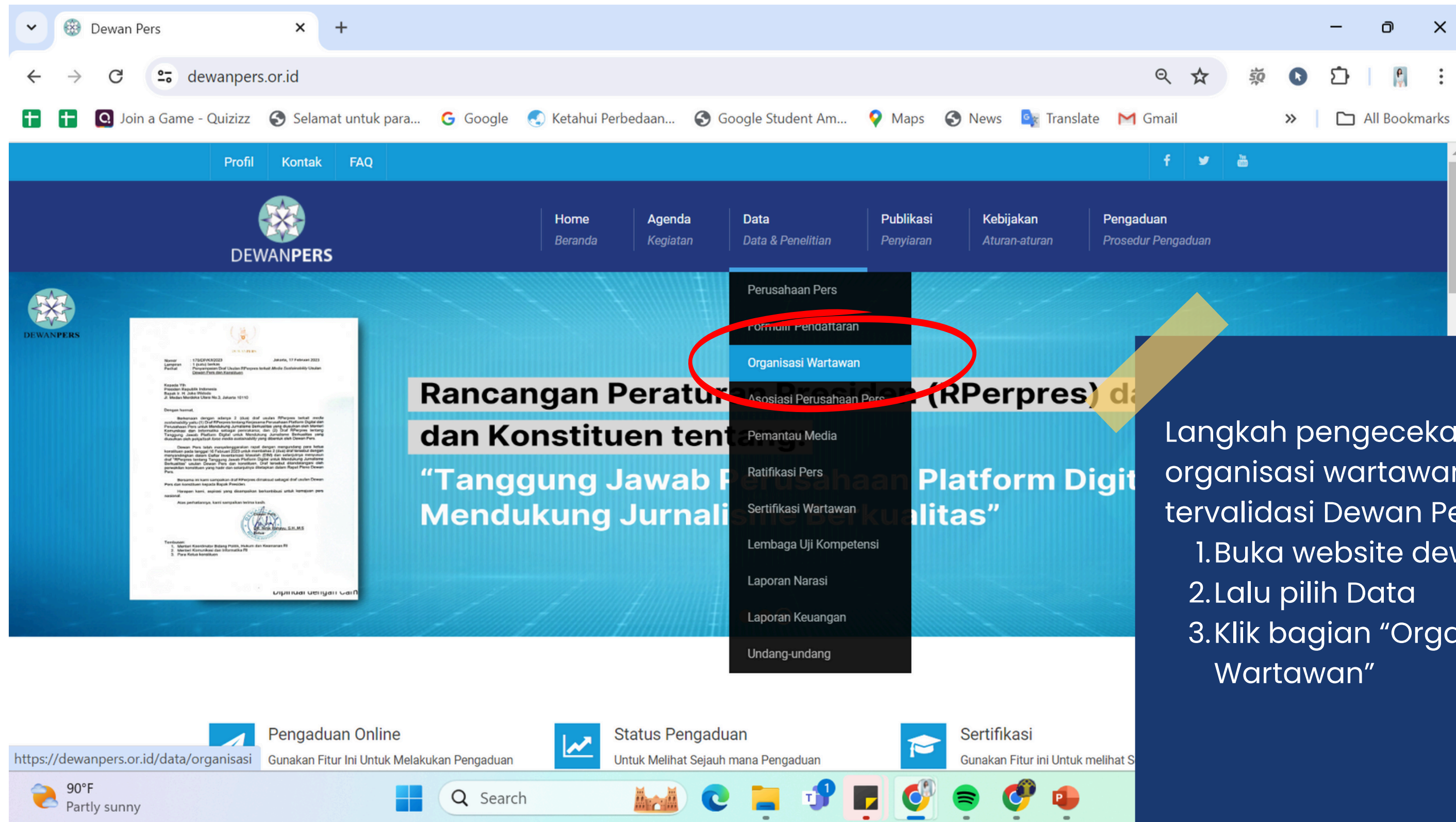


The screenshot shows the website dewanpers.or.id in a browser. The navigation menu includes: Home (Beranda), Agenda (Kegiatan), Data (Data), Publikasi (Penyiaran), Kebijakan (Aturan-aturan), and Pengaduan (Prosedur Pengaduan). The 'Data' menu is expanded, and 'Perusahaan Pers' is highlighted with a red circle. Other items in the 'Data' dropdown include: Formulir Pendaftaran, Organisasi Wartawan, Asosiasi Perusahaan Pers, Pemantau Media, Ratifikasi Pers, Sertifikasi Wartawan, Lembaga Uji Kompetensi, Laporan Narasi, Laporan Keuangan, and Undang-undang.

Langkah pengecekan media tervalidasi Dewan Pers :

1. Buka website dewanpers
2. Lalu pilih Data
3. Klik bagian "Perusahaan Pers"

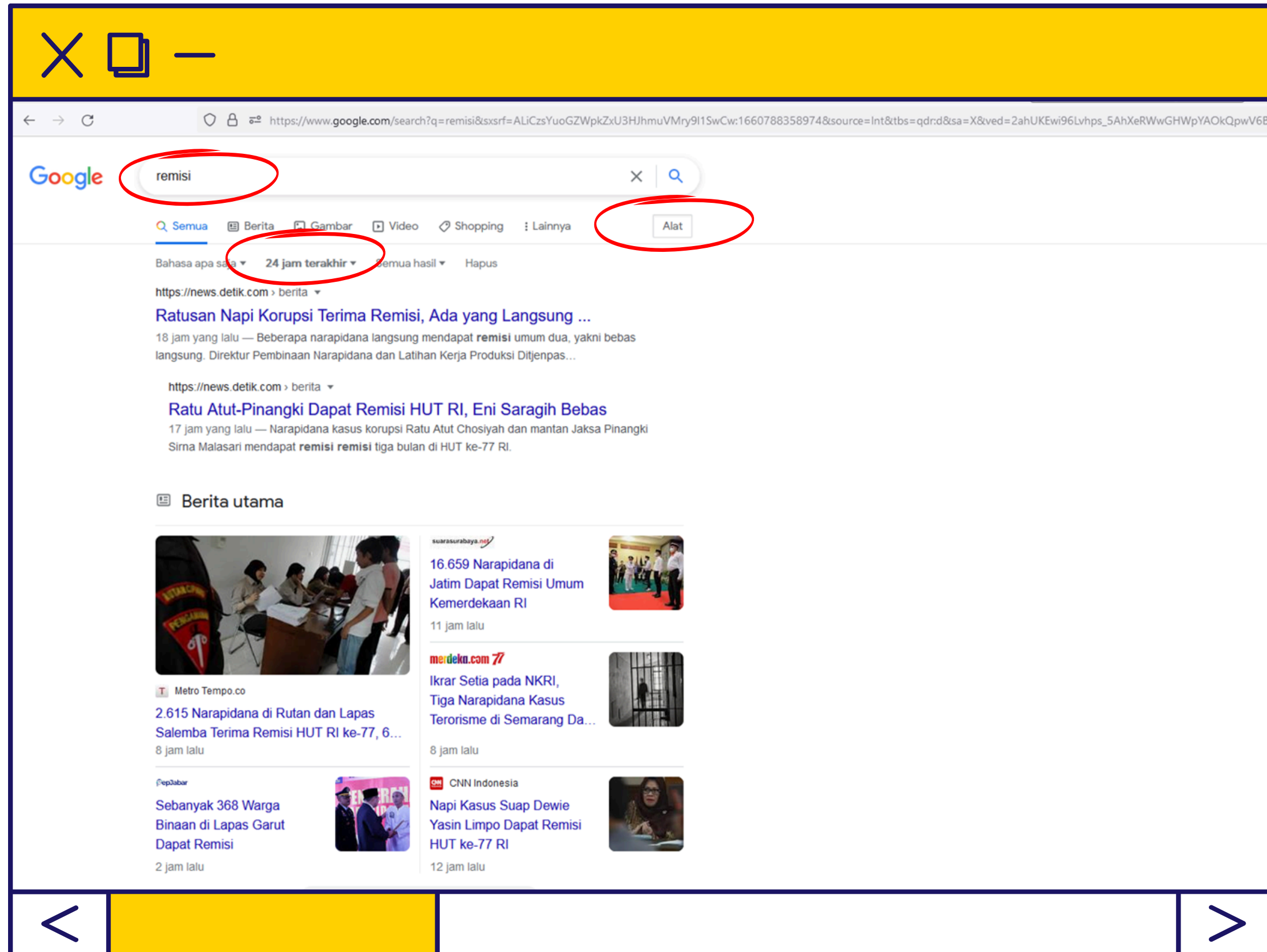
Cara Mengecek Organisasi Wartawan Tervalidasi Dewan Pers



Langkah pengecekan organisasi wartawan tervalidasi Dewan Pers :

1. Buka website dewanpers
2. Lalu pilih Data
3. Klik bagian "Organisasi Wartawan"

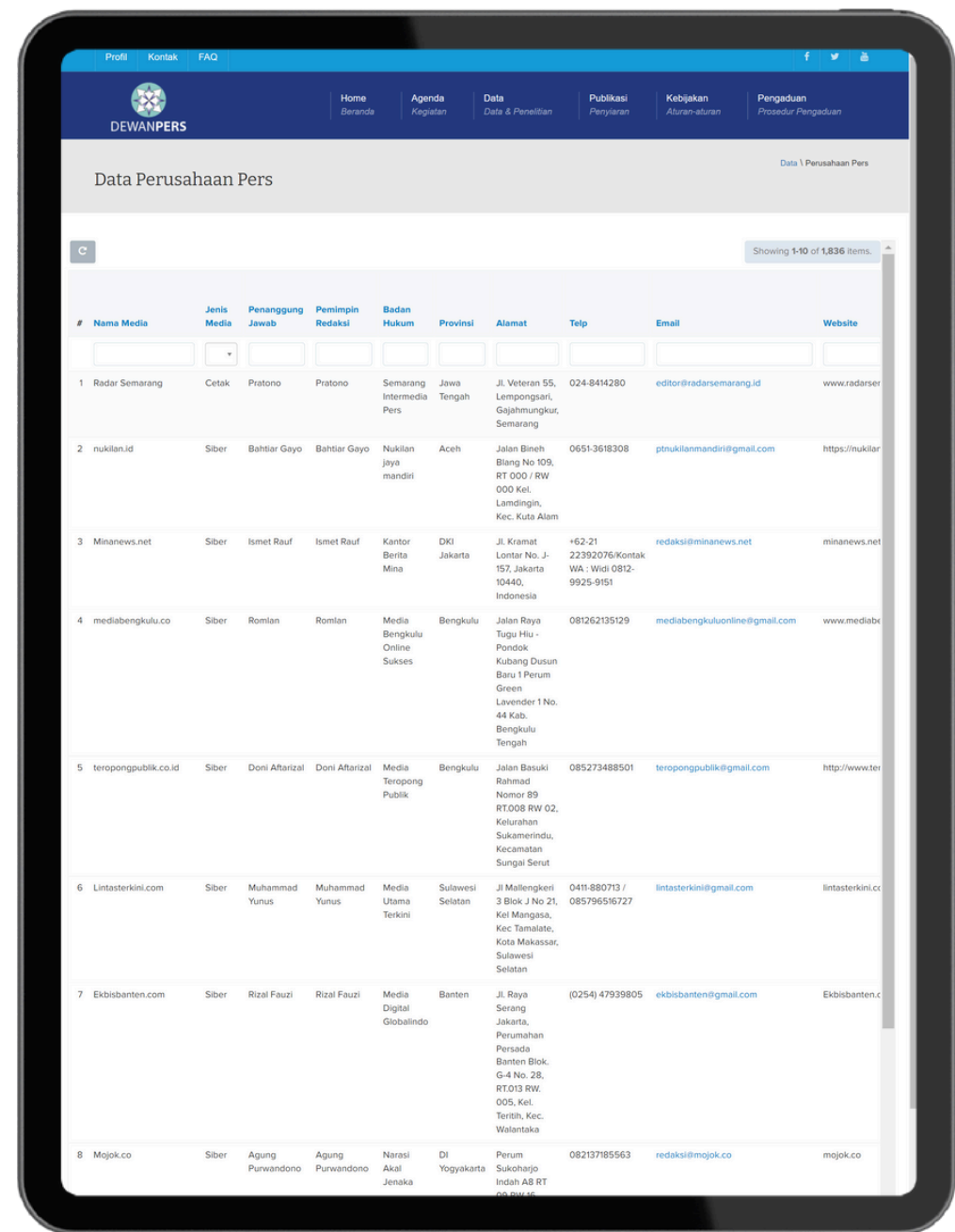
Cara Mengecek Media Terindeks Google



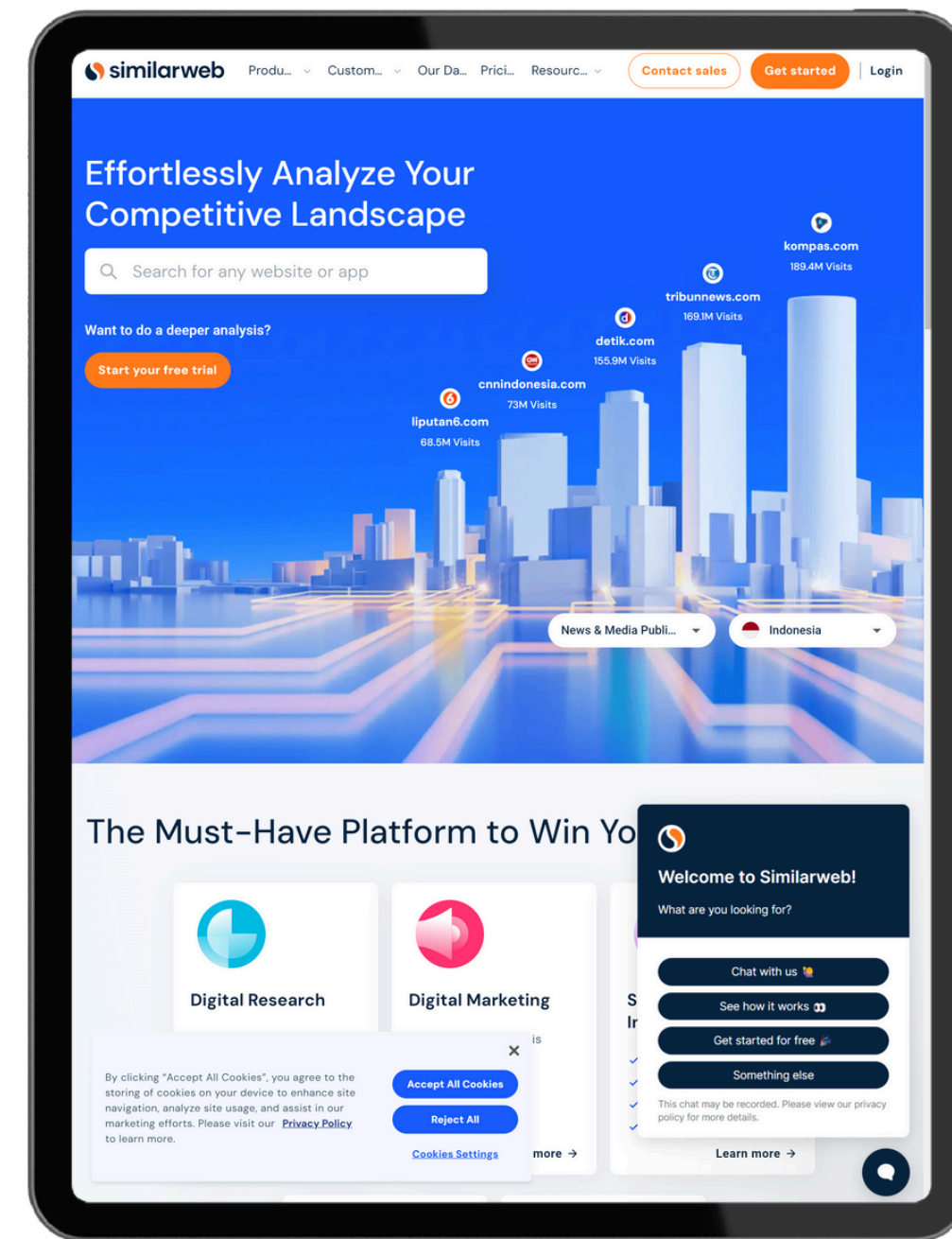
Langkah pengecekan media terindeks Google:

1. Buka website google
2. Lalu pilih alat
3. Ganti waktu menjadi "24 Jam terakhir"
4. Berita dari media yang terindeks Google akan muncul di halaman pertama Google

Cek perusahaan pers di website Dewan Pers



Cek traffic website media di Similar Web

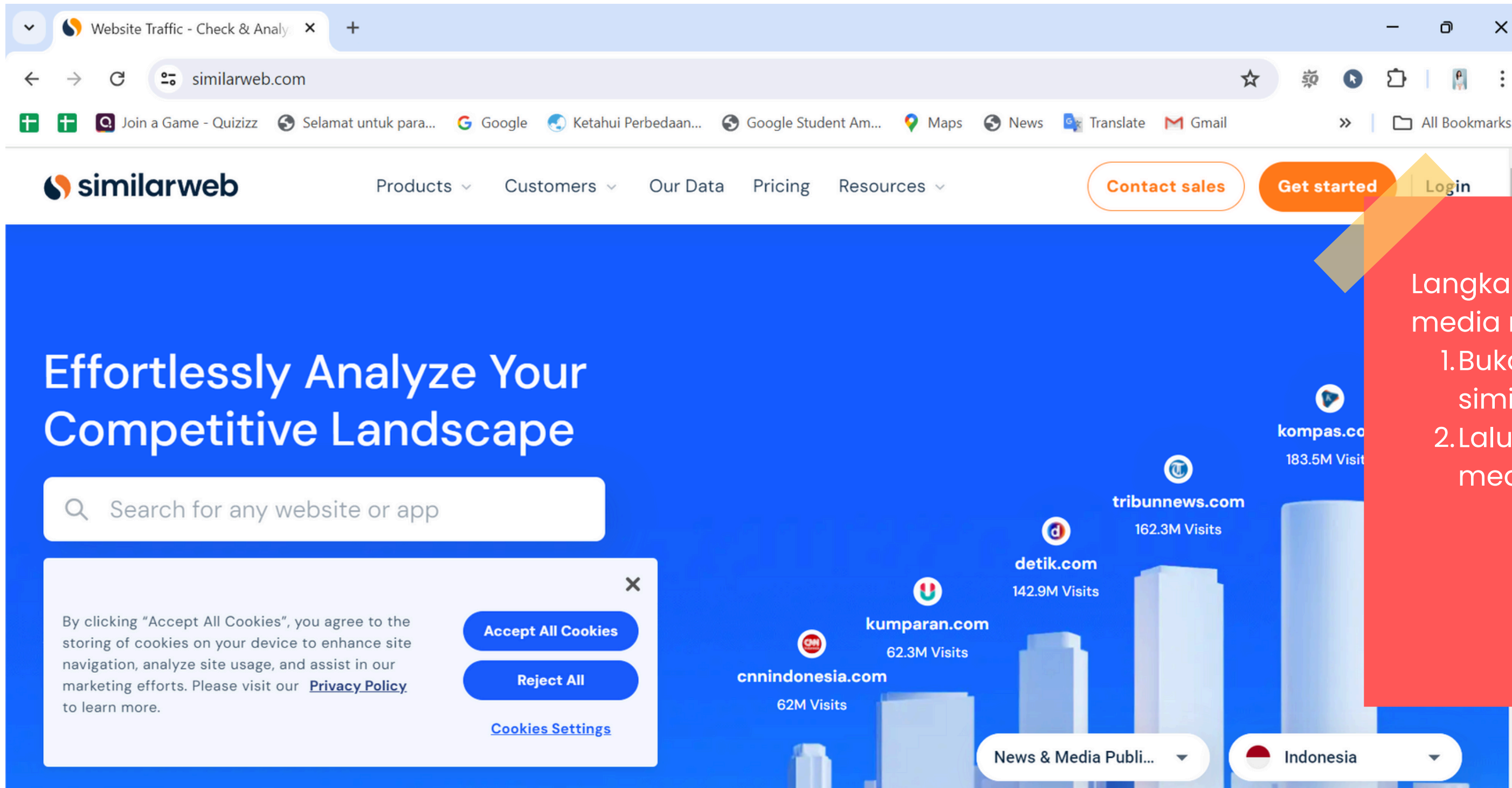


<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>

<https://www.similarweb.com/>

Cara Mengecek di Similar Web

Similarweb.com merupakan situs yang memberikan informasi tentang kualitas suatu situs ataupun website.



The screenshot shows the homepage of Similarweb.com. The main heading is "Effortlessly Analyze Your Competitive Landscape". Below the heading is a search bar with the placeholder text "Search for any website or app". To the right of the search bar is a bar chart showing the traffic of several Indonesian news websites. The chart includes the following data:

Website	Visits
cnnindonesia.com	62M Visits
kumparan.com	62.3M Visits
detik.com	142.9M Visits
tribunnews.com	162.3M Visits
kompas.com	183.5M Visits

At the bottom of the chart, there are two dropdown menus: "News & Media Publi..." and "Indonesia".

Langkah pengecekan traffic media melalui Similar Web:

1. Buka website similarweb.com
2. Lalu masukan link website media di kolom search



nawacitapost.com

portal berita yang menyediakan informasi populer, update, viral tentang kesehatan, [Show more](#)

Company	Nawacita Post
Year Founded	--
Employees	201 - 500
HQ	India, Bekasi
Annual Revenue	--
Industry	News & Media Publishers

similarweb



🌐 Global Rank ⓘ

#**273,632**
▲ 29,256

🇮🇩 Country Rank ⓘ

#**11,770**
▲ 1,845
Indonesia

📰 Category Rank ⓘ

#**270**
▲ 45
[News & Media Publishers](#)
(In Indonesia)

Showing Similarweb estimated data.
Publicly validate your site's metrics by connecting your GA4

[📊 Connect your Google Analytics](#)

nawacitapost.com Ranking by Traffic

Website ranking helps evaluate the value of a business. Over the last three months, nawacitapost.com's global ranking has decreased from 302,888 to 273,632.

Category Rank

News & Media Publishers
(In Indonesia)

Country Rank

In Indonesia

Global Rank



Similarly ranked sites

268 tagar.id

269 activehosted.com

270 nawacitapost.com

271 news.yahoo.co.jp

nawacitapost.com Traffic & Engagement Analysis

nawacitapost.com's traffic has increased by 78.63% compared to last month (Desktop). Click below to reveal how well nawacitapost.com meets visitor expectations and captures their interest.

Showing Similarweb estimated data. Publicly validate your site's metrics by connecting your GA4

[Connect your Google Analytics](#)

Total Visits	Last Month Change	Bounce Rate	Pages per Visit	Avg Visit Duration
210.9K	↑ 78.63%	70.03%	1.67	00:00:57

Total Visits Last 3 Months



kemenkumham.go.id Traffic Ana x +

similarweb.com/website/kemenkumham.go.id/#overview

Join a Game - Quizizz Selamat untuk para... Google Ketahui Perbedaan... Goog

similarweb Products Customers Our Data Prici

kemenkumham.go.id VS. + Compare this site to

Overview Ranking Audience Competitors Marketing channels Outgoing links Technologies

kemenkumham.go.id
official website kementerian hukum dan ham

Company	Ministry of Law and Human Rights
Year Founded	--
Employees	> 10001
HQ	Indonesia, Kedoya Selatan
Annual Revenue	--
Industry	Computers Electronics and Technology

similarweb

Global Rank #20,466 ▲ 3,472

Country Rank #722 ▲ 76 Indonesia

Category Rank #164 ▲ 12 Computers Electronics and Technology (In Indonesia)

Showing Similarweb estimated data.
Publicly validate your site's metrics by connecting your GA4

Connect your Google Analytics

Contoh media cetak tier 3 atau 4

Harian Umum
SINAR PAGI BARU
DINAMIKA PEMBARUAN DAN PEMBANGUNAN
Buletin Harian Nasional Koran Sin Pagi (KSP), No. 33/PAD-1.02, 11 April 2021 di No. 1674/BNH, tanggal 20 Februari 1985, Arangra-SPS No. 3300002/11-02002
EDISI 1050, SENIN 3 MEI 2021 Online: www.sinarpagibaru.id - www.cibjpost.id Harga Rp 4.500,- (Diklar. orngkos krm)

Sidang Kasus Ajay JPU Ajukan Tiga Saksi PNS 2
HUT ke-22, Pemkot Depok Berikan Persalinan Gratis Untuk Masyarakat 4
Bupati Indramayu Nina, Resmi Lantik Tiga Pejabat Kepala Dinas 5
Bupati Barito Kuala Dan Forkopimda Ikuti Rakor Bersama Presiden 7
Bupati Banjar Salurkan Bantuan Untuk Perbaiki Rumah Ruda Di 20 Desa 12

Kapolri Tawarkan Anak Prajurit Awak Nanggala 402 Jadi Polisi
SINAR PAGI BARU, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggelar upacara pengantugrahan tanda kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) terhadap prajurit awak KRI Nanggala 402 di KAPOLRI TAWARKAN >>> 11

Persiden Joko Widodo Didampingi Bupati Indramayu Senang Produktivitas Padi Tinggi Dan Harga Gabah Tak Anjlok
INDRAMAYU, SINAR PAGI BARU - Rabu 21/4/2021 Persiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Widodo mengukir kebanggaan dengan produksi padi masa panen raya awal 2021 dan harga gabah petani sudah tidak anjlok lagi karena dengan adanya gerakan serap gabah. PRESIDEN JOKO WIDODO >>> 11

Menuju 57 Tahun HBP, Harus Kembali ke Marwah Penegakan Hukum
SINAR PAGI BARU - JAKARTA - Peringatan Hari Bakti Pemasayarakatan (HBP) Ke-57 menjadi momentum untuk merefleksikan kembali cita-cita para pendahulu dan peletak dasar Pemasayarakatan. Seluruh jajaran Pemasayarakatan juga harus mulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru sesuai semangat "Akselerasi Adaptasi, Pemasayarakatan PASTI Maju" sebagaimana tema HBP Ke-57. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, kepada seluruh jajaran Pemasayarakatan dalam Upacara HBP Ke-57, Selasa (27/4/2021) yang dipusatkan di Graha Pengayoman, Jakarta. "Pemasayarakatan harus mampu membangun kapasitas pribadi para pelanggar hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik melalui pembinaan berkesinambungan, sistematis, dan terarah dengan mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak-hak mereka MENUJU 57 TAHUN >>> 10

Terkait Korupsi Dana Hibah 117 Mtim Kejati Banten Sita Dokumen Bantuan Ponpes
Serang - Kasus dugaan pemotongan dana hibah untuk pondok pesantren yang dianggarkan dari APBD Banten tahun 2020 kini masuk babak baru, yang mana sebelumnya pihak kejaksaan tinggi Banten telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Kasus dugaan pemotongan bantuan dana hibah untuk pondok pesantren itu kini perlahan namun pasti sedang dilakukan proses penyelidikan oleh tim kejati Banten. TERKAIT KORUPSI >>> 10

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Yasona Laoly: Tingkatkan Daya Saing Global UMKM !
SINAR PAGI BARU - JAKARTA. Sektor ekonomi kreatif mempunyai potensi besar menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan. Indonesia mencatatkan kontribusi kekayaan intelektual (KI) sebesar Rp 1.105 triliun pada 2019. Atau kurang lebih 7 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang selama satu tahun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, capaian KI pada PDB ini mencatatkan Indonesia pada posisi ketiga di dunia. HARI KEKAYAAN >>> 11

Pesan Menteri Tjahjo Saat Melantik 3 Pejabat Tinggi Madya Kementerian PANRB
SINAR PAGI BARU-JAKARTA - Sebagai aparat sipil negara, pejabat pimpinan tinggi (PPT) Madya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut mengemban tugas untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia. PESAN MENTERI TJAHJO >>> 11

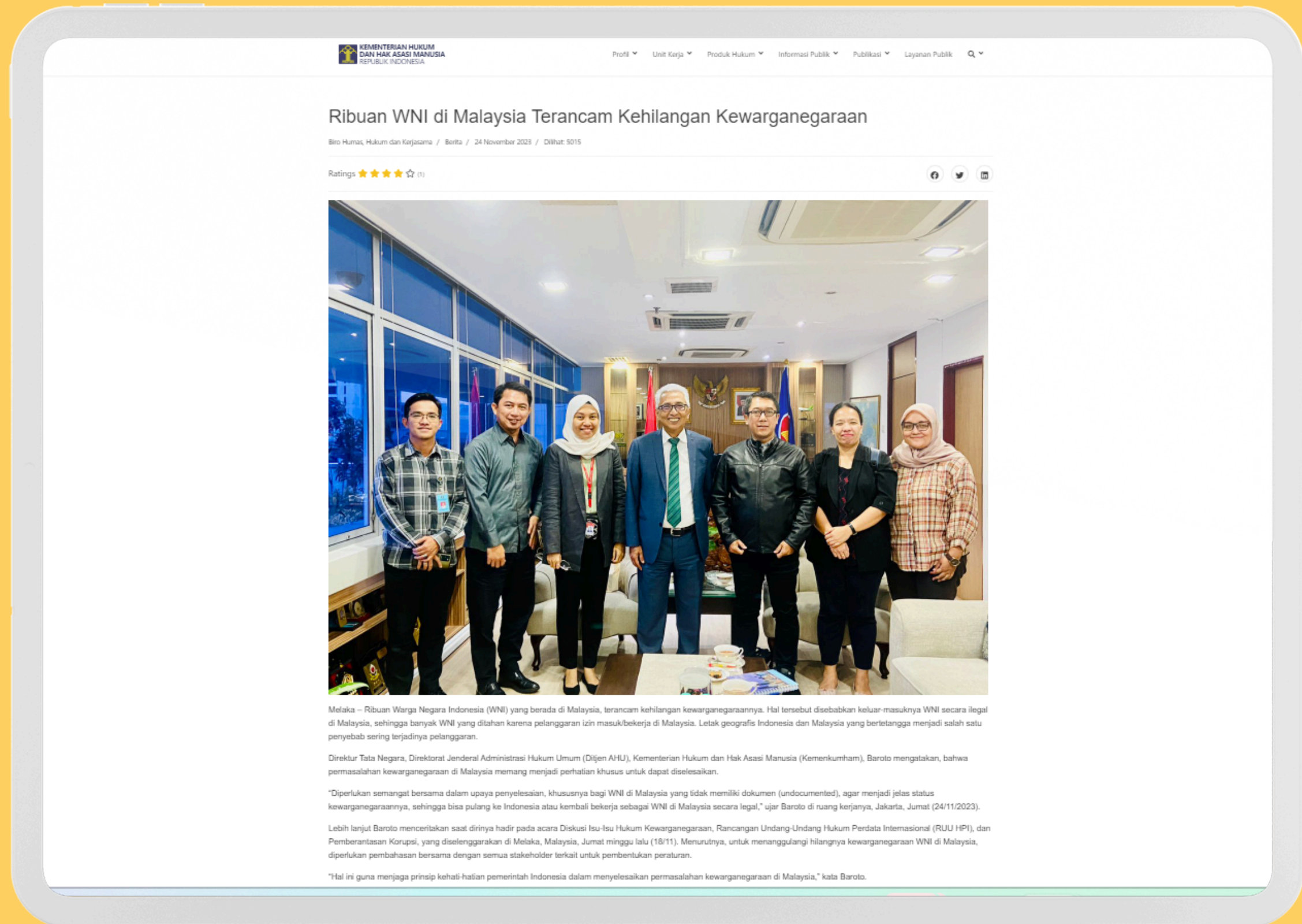
ROKOK DAN MIRAS MERUPAKAN AWAL SESEORANG UNTUK MENCoba MENGGUNAKAN NARKOBA WAR ON DRUGS



CONTOH PEMBERITAAN

Berikut ini adalah contoh pemberitaan yang baik dan sesuai kaidah jurnalistik

Pemberitaan ini merupakan pemberitaan yang bersifat internal instansi tetapi melalui pengemasan berita dan hubungan media yang baik, berita ini dapat diangkat menjadi berita nasional yang diketahui oleh publik.




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Profil Unit Kerja Produk Hukum Informasi Publik Publikasi Layanan Publik

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama / Berita / 24 November 2023 / Dilihat 5015

Ratings ★★★★★ (1)



Melaka – Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, terancam kehilangan kewarganegaraannya. Hal tersebut disebabkan keluar-masuknya WNI secara ilegal di Malaysia, sehingga banyak WNI yang ditahan karena pelanggaran izin masuk/bekerja di Malaysia. Letak geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pelanggaran.

Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Baroto mengatakan, bahwa permasalahan kewarganegaraan di Malaysia memang menjadi perhatian khusus untuk dapat diselesaikan.

"Diperlukan semangat bersama dalam upaya penyelesaian, khususnya bagi WNI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen (undocumented), agar menjadi jelas status kewarganegaraannya, sehingga bisa pulang ke Indonesia atau kembali bekerja sebagai WNI di Malaysia secara legal," ujar Baroto di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Lebih lanjut Baroto menceritakan saat dirinya hadir pada acara Diskusi Isu-Hukum Kewarganegaraan, Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), dan Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan di Melaka, Malaysia, Jumat minggu lalu (18/11). Menurutnya, untuk menanggulangi hilangnya kewarganegaraan WNI di Malaysia, diperlukan pembahasan bersama dengan semua stakeholder terkait untuk pembentukan peraturan.

"Hal ini guna menjaga prinsip kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan di Malaysia," kata Baroto.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ribuan-wni-di-malaysia-terancam-kehilangan-kewarganegaraan>

Diskusi Teknis Mengenai Isu-Isu Hukum di KBRI Kuala Lumpur, 17-18 November 2023

Perwakilan Ditjen AHU (Delri) yang terdiri dari perwakilan Direktorat Tata Negara, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) mengadakan kunjungan kerja ke KBRI Kuala Lumpur atas dasar undangan Duta Besar RI Kuala Lumpur untuk membahas Diskusi Isu-Isu Hukum bersama KBRI Kuala Lumpur terkait Kebijakan Kewarganegaraan di Malaysia dan Permasalahan Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Hal ini didasari oleh hubungan lintas batas yang intens antara WN Indonesia dan WN Malaysia, akibat perbatasan langsung baik wilayah darat maupun laut.

Pertemuan diawali dengan pembahasan isu-isu kewarganegaraan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, yang menyampaikan permasalahan WNI undocumented di Indonesia. Pentingnya penegasan status kewarganegaraan RI bagi WNI yang tidak memiliki dokumen dan bukti kewarganegaraan di luar wilayah Indonesia. Khususnya di Malaysia, data dari KBRI menunjukkan terdapat 33.742 permohonan untuk meminta bukti kewarganegaraan RI bagi WNI undocumented per Januari 2023. Kondisi ini merupakan kondisi yang "extraordinary" dan dikhawatirkan tidak makin berkurang tetapi semakin meningkat, mengingat mudahnya jalur perpindahan manusia dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya. (17/11/2023)

Untuk mengatasi permasalahan ini, seringkali KBRI Kuala Lumpur mengambil langkah khusus dengan pertimbangan dan kebijakan berdasarkan kemanusiaan, memberikan dokumen kewarganegaraan bagi WNI yang berada di wilayah Malaysia yang tidak memiliki atau memiliki sebagian dokumen kewarganegaraan yang telah tinggal secara turun temurun namun tidak pernah kehilangan kewarganegaraan.

Kebijakan Duta Besar LBBP RI diberikan dengan mempertimbangkan bukti-bukti berupa dokumen maupun kesaksian yang dimiliki oleh WNI atau berdasarkan pengakuan WNI yang dilakukan melalui akuan sumpah oleh Pesuruhjaya Sumpah di Malaysia, termasuk mempertimbangkan dokumen keterangan kepala kampung setempat. Namun Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur menyadari hal tersebut tidak bisa terus menerus dilakukan tanpa adanya peraturan teknis pelaksana UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Usul pembahasan ini sudah berkali-kali disampaikan ke Pemerintah Pusat. Hermono mengharapkan Pusat segera menindaklanjuti pembentukan peraturan teknis pelaksanaan untuk menghindari hilangnya WNI di luar negeri dan juga dasar perlindungan negara kepada warga negaranya. Perlindungan teknis tersebut dapat berupa Perpres atau Permenkumham, merujuk kepada amanat dari UU 12/2006.

Pertemuan dilanjutkan dengan Diskusi terkait dengan Kebijakan Kewarganegaraan di Malaysia dan Permasalahan Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) di Melaka pada tanggal 18 Nov 2023, yang melibatkan seluruh perwakilan dari tisi KBRI dan Konjen RI di Malaysia, masyarakat perkawinan campur di Malaysia, perwakilan Ormas, dan melibatkan narasumber dari Hakim dan Akademisi UI. Diskusi di moderatori oleh Atase Hukum, Ibu Andi Eva Nurliani, yang selama ini terjun langsung menangani kasus-kasus kewarganegaraan di Malaysia.

Selain isu kewarganegaraan, Atase Hukum sebagai perwakilan Ditjen AHU di Malaysia juga fokus kepada penyusunan RUU HPI dimana Kumham, khususnya Ditjen AHU, turut menjadi tim pembentukan RUU ini. RUU HPI merupakan bentuk perlindungan hukum perdata internasional di Indonesia, yang akan menggantikan regulasi peninggalan kolonial (Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen*) yang sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum WNI di luar negeri. Untuk itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Keputusan DPR RI No. 15/DPR RI/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 sepakat untuk menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2024, dimana RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024, agar dapat diundangkan di akhir tahun 2024 sebagai undang-undang portal yang dapat melindungi WNI dan Badan Usaha Indonesia dalam melakukan aktivitas perdata yang bersinggungan dengan asing.

Diskusi pembahasan RUU HPI di Malaysia merupakan Diskusi Publik yang Pertama di Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemrakarsa RUU HPI (Kementerian Hukum dan HAM) sebagai bagian dari Partisipasi Masyarakat dalam mendukung terciptanya RUU HPI. Diskusi ini mendapat respon yang positif dari peserta, khususnya dari pegawai di KBRI, Keimigrasian dan Konjen. Beberapa peserta berharap UU HPI segera hadir, karena akan menjawab beberapa permasalahan yang kerap di temui di kantor perwakilan RI di Luar Negeri antara lain:

- Rogatori / Pengiriman Dokumen Perdata dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya yang saat berjalan namun tidak efektif;
- membantu menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan adopsi anak Indonesia oleh WN Malaysia atau anak-anak Indonesia yang lahir di Malaysia tanpa status oleh WNI di Malaysia, ataupun pengambilan anak Malaysia (dual citizenship) hasil perkawinan yang sah antara WNI (wanita) dan WNM (pria) yang lahir dan besar di Malaysia, dimana WNM tersebut telah meninggal dunia;
- dan mempercepat pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dimana banyak pihak khususnya pelaku kawin campur, membutuhkan kemudahan dan kecepatan access to justice ini.

Diskusi berjalan dengan lancar disertai dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kegiatan diskusi, dan ditutup oleh Ibu Rossy Verona (Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur) dengan harapan segera mendapatkan kejelasan khususnya terkait dengan peraturan teknis tentang tata cara penegasan status kewarganegaraan RI bagi WNI yang tidak memiliki dokumen dan bukti kewarganegaraan di luar wilayah negara RI.

[DJ Jakarta](#) 20/11/2023

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama / Berita / 24 November 2023 / Dilihat: 5021

Melaka – Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, terancam kehilangan kewarganegaraannya. Hal tersebut disebabkan keluar-masuknya WNI secara ilegal di Malaysia, sehingga banyak WNI yang ditahan karena pelanggaran izin masuk/bekerja di Malaysia. Letak geografis Indonesia dan Malaysia yang bertelangga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pelanggaran.

Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Baroto mengatakan, bahwa permasalahan kewarganegaraan di Malaysia memang menjadi perhatian khusus untuk dapat diselesaikan.

"Diperlukan semangat bersama dalam upaya penyelesaian, khususnya bagi WNI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen (undocumented), agar menjadi jelas status kewarganegaraannya, sehingga bisa pulang ke Indonesia atau kembali bekerja sebagai WNI di Malaysia secara legal," ujar Baroto di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Lebih lanjut Baroto menceritakan saat dirinya hadir pada acara Diskusi Isu-Isu Hukum Kewarganegaraan, Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), dan Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan di Melaka, Malaysia, Jumat minggu lalu (18/11). Menurutnya, untuk menanggulangi hilangnya kewarganegaraan WNI di Malaysia, diperlukan pembahasan bersama dengan semua stakeholder terkait untuk pembentukan peraturan.

"Hal ini guna menjaga prinsip kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan di Malaysia," kata Baroto.

"Kami akan selalu upayakan untuk hal tersebut (pembentukan peraturan)", tandas Baroto.

Dalam diskusi dimaksud, Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia, Hermono menyampaikan permasalahan WNI undocumented di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur mengambil langkah khusus dengan memberikan dokumen kewarganegaraan bagi WNI yang berada di Malaysia, yang tidak memiliki atau memiliki sebagian dokumen kewarganegaraan yang telah tinggal secara turun temurun, namun tidak pernah kehilangan kewarganegaraan.


KBRI Kuala Lumpur mencatat, telah mengeluarkan 33.742 Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK).

"Kondisi ini merupakan kondisi yang 'extraordinary' dan dikhawatirkan tidak makin berkurang tetapi semakin meningkat, mengingat mudahnya jalur perpindahan manusia dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya," ujar Hermono .

Namun, lanjut Hermono, KBRI Kuala Lumpur menyadari pemberian SKSK dan SBPK masih membutuhkan pedoman dan regulasi dibawah Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sebagaimana semangat bersama pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Untuk itu, kami mengharapkan pemerintah pusat segera menindaklanjuti pembentukan peraturan teknisnya

"Kegiatan ataupun pembahasan ini dilakukan untuk menghindari hilangnya WNI di luar negeri, dan juga sebagai dasar perlindungan negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat dari UU No. 12 Tahun 2006", tutup Hermono.

HASIL PEMBERITAAN

 Kementerian Hukum dan HAM RI

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan - web.kemenkumham.go.id

Hal tersebut disebabkan keluar-masuknya WNI secara ilegal di Malaysia, sehingga banyak WNI yang ditahan karena pelanggaran izin masuk/bekerja di...

24 Nov 2023



 CNN Indonesia

Kemenkumham: Ribuan WNI di Malaysia Terancam Hilang Kewarganegaraan

Ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia terancam kehilangan kewarganegaraannya lantaran keluar masuk secara ilegal.

25 Nov 2023



 Kompas.com

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan, Apa yang Terjadi? - Kompas.com

Menurut Harmono, KBRI Kuala Lumpur berusaha mengatasi ancaman ini dengan memberikan dokumen kewarganegaraan bagi WNI di Malaysia, yang tidak...

24 Nov 2023



 Okezone.com

4 Fakta Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Ribuan Warga Negara Indonesia WNI yang berada di Malaysia terancam kehilangan kewarganegaraannya. - 1. Banyak WNI Ditahan Akibat Pelanggaran...

24 Nov 2023




 IDN Times

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

KBRI Kuala Lumpur mencatat, telah mengeluarkan 33.742 Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran...

24 Nov 2023



 Duta TV

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia terancam kehilangan kewarganegaraannya. Hal itu disebabkan keluar-masuk WNI.

27 Nov 2023




 Langit7.id

Pakai Peci, Kiper Belanda Maarten Paes Sah Jadi WNI

Kiper Belanda keturunan Indonesia, Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Selasa (30/4/2024)....

21 jam yang lalu



 Lombok Post

Masuk Secara Ilegal di Malaysia WNI Bisa Kehilangan Status Kewarganegaraan - Lombok Post

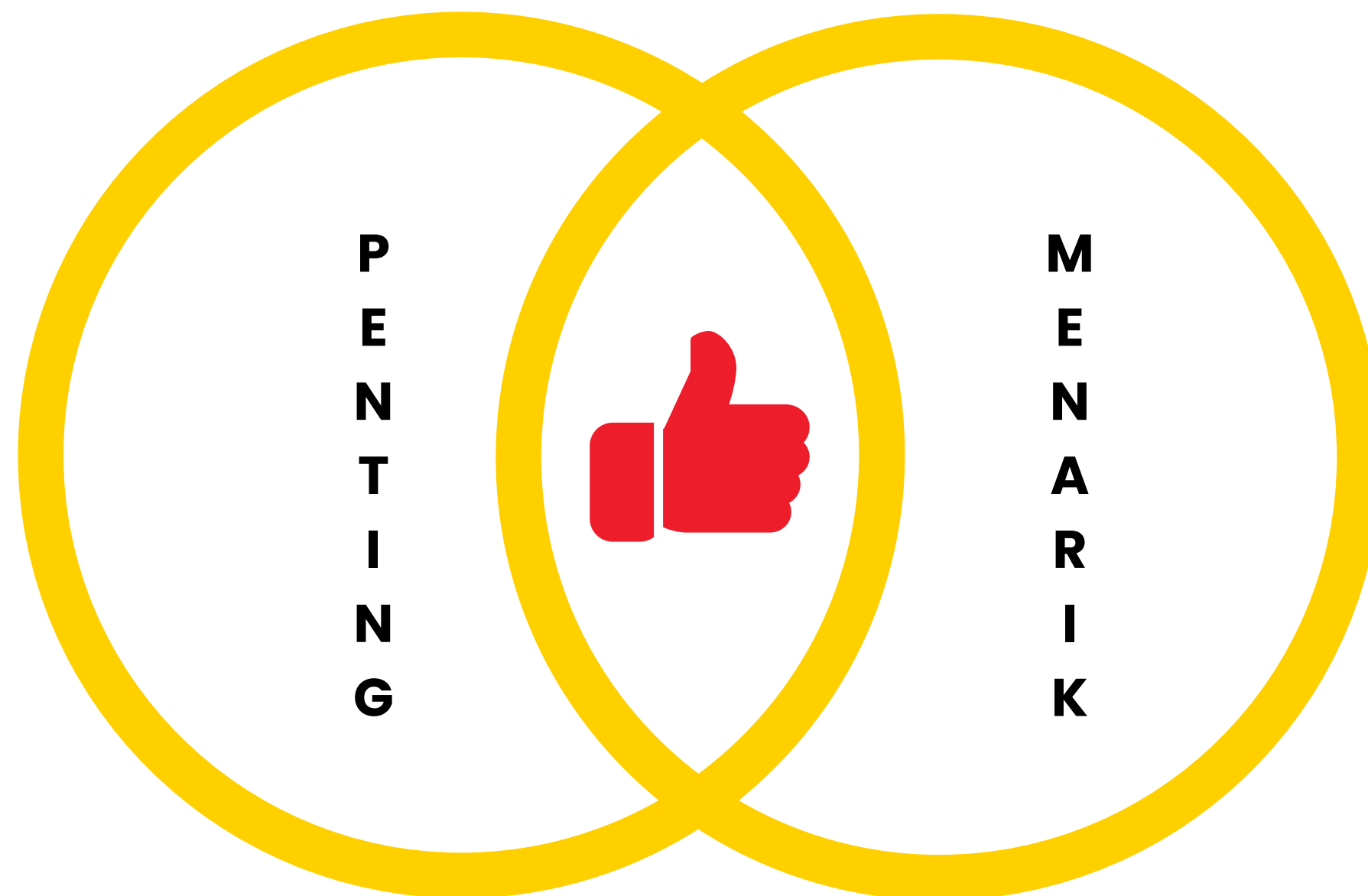
Kasus warga negara Indonesia (WNI) masuk dan keluar dari Malaysia secara ilegal masih marak terjadi. Mereka yang ketahuan akhirnya tertangk.

27 Nov 2023



BERITA HARUS MEMENUHI UNSUR :

Pemberitaan setidaknya harus memenuhi unsur penting atau menarik. TAPI BERITA AKAN LEBIH BAIK jika memenuhi 2 unsur yaitu penting dan menarik



Manajemen Iklan



MANAJEMEN IKLAN



1

Setiap satuan kerja menyiapkan anggaran iklan

2

Iklan dapat dilakukan dalam bentuk advertorial, berita mengalir, poster, adlibs, infografis, videografis, running text, peliputan khusus, talkshow. maupun bentuk lainnya

3

Iklan dipublikasikan oleh media massa yang memenuhi unsur ketentuan media

4

Iklan dilakukan secara terkoordinasi untuk pemerataan media dan menghindari tumpang tindih iklan pada media massa tertentu :

- a. Unit Utama berkoordinasi dengan Biro Hukerma
- b. UPT berkoordinasi dengan Kantor Wilayah

Iklan memenuhi kriteria **AIDCA** :

1. Attention (Perhatian)
2. Interest (Minat)
3. Desire (Kebutuhan)
4. Conviction (Keyakinan)
5. Action (Tindakan)

**WAJIB MINTA
BUKTI TAYANG
IKLAN**

Contoh Pemasangan Iklan yang SALAH



detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional

Yasonna Beberkan Capaian Kemenkumham Rampungkan Regulasi di 2021

Advertorial - detikNews

Kamis, 30 Des 2021 08:00 WIB


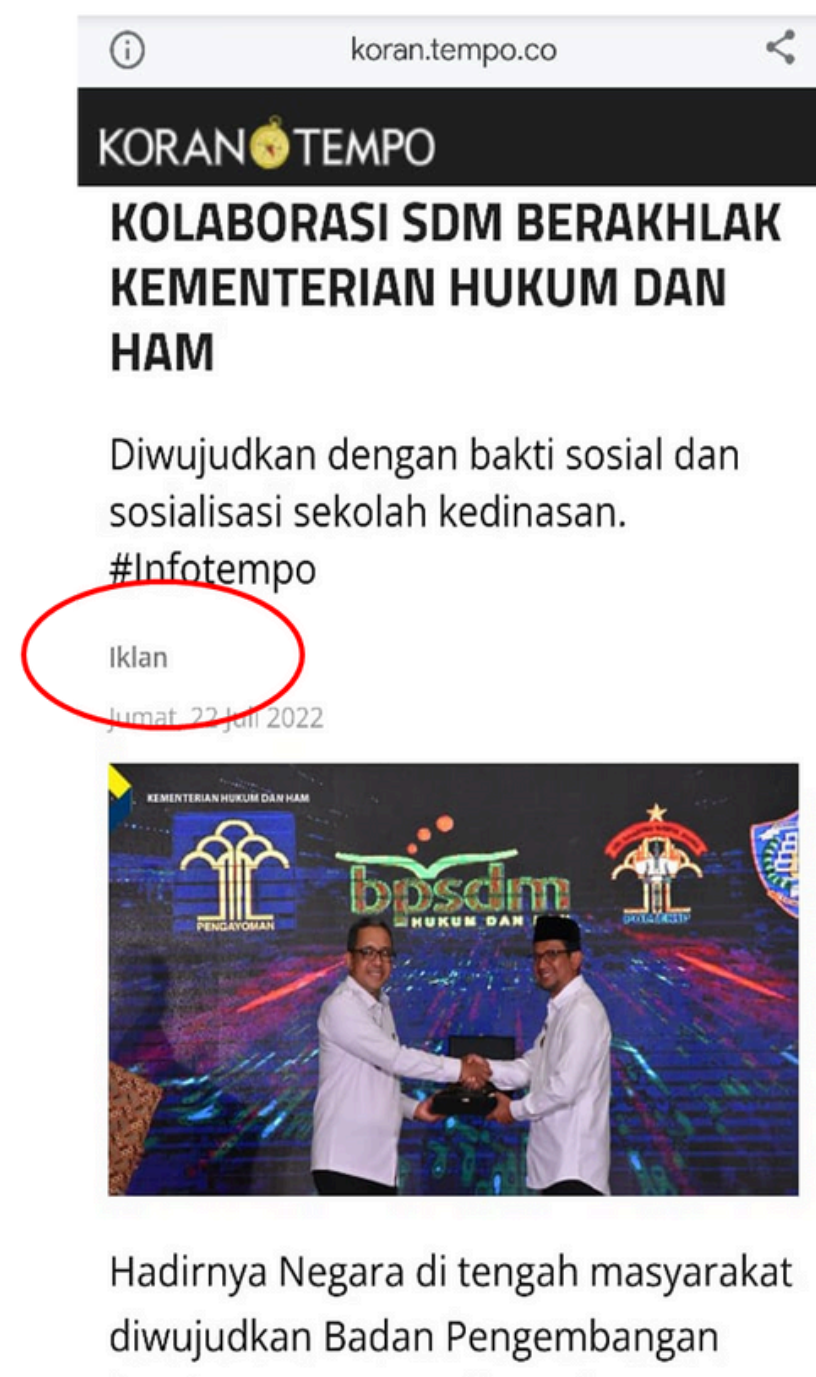


Foto: dok. Kemenkum HAM

Jakarta - Selama tahun 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyiapkan regulasi dengan angka yang terbilang tinggi. Diketahui, upaya



koran.tempo.co

KORAN TEMPO


KOLABORASI SDM BERAKHLAK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Diwujudkan dengan bakti sosial dan sosialisasi sekolah kedinasan.

#Infotempo

Iklan

Jumat, 22 Juli 2022



Hadirnya Negara di tengah masyarakat diwujudkan Badan Pengembangan



detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional

Pria Hidung Belang Penikmat Prostitusi Disebut Bisa Dijerat Pasal Ini
49 menit yang lalu

Susun Regulasi, Ini Deretan RUU yang Dirampungkan Kemenkumham di 2021
Promoted

Gempa M 5 Guncang Halmahera Barat
59 menit yang lalu



ADVERTISEMENT

Lazada

TUNJUKIN CARA CARE KAMU

*Syarat & Ketentuan Berlaku

“
Ketika beriklan, negosiasi ke pihak media agar advertorial ditulis sebagai berita mengalir bukan dimasukkan dalam kategori “advertorial”

Dengan adanya title “advertorial” pembaca akan merasa bahwa berita yang disampaikan merupakan berita positif yang sengaja ditampilkkan oleh instansi bukan POV dari media

”

Contoh Pemasangan Iklan yang BENAR

TEMPO.CO login Q MENU

HOME > NASIONAL >

Sepanjang 2021, Kemenkumham Giat Rampungkan Regulasi

Oleh: Tempo.co
Minggu, 19 Desember 2021 18:37 WIB

f t w p +



INFO NASIONAL - Di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tuntutan masyarakat terkait keadilan dan hukum sangat tinggi. Hal ini menjadikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja keras mewujudkan harapan tersebut.

detiknews LIVE

Home Berita Daerah Jawa Timur Intern

detikNews / Berita

Kemenkum HAM Raih 2 Penghargaan Atas Laporan Keuangan dari Kemenkeu

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 16:55 WIB



Foto: Kemenkum HAM

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM meraih dua penghargaan atas laporan keuangan dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 secara virtual.

Life is for FUN MINISO

“

Berita ini menunjukkan POV positif media bukan atas nama instansi sehingga masyarakat lebih percaya bahwa berita ini merupakan berita yang ditulis oleh jurnalis media tersebut.

”

Contoh Iklan yang BENAR

Menampilkan pimpinan bersama pimpinan tertinggi (Menkumham/ Wamenkumham)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

CAPAIAN GEMILANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan berbagai macam inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama pandemi Covid-19.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kementerian dengan aparatur sipil negara sebanyak 61.527 orang, 1.026 satuan kerja dari Sabang sampai Merauke dan perwakilan RI di luar negeri memiliki peran strategis dalam bidang hukum. Antara lain dalam berbagai pelayanan kepada masyarakat, pembangunan hukum serta penegakan hukum.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 Unit Eselon I, terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Tahun ini, Indonesia masih dihadapkan pada masa pandemi Covid-19. "Dengan adanya pandemi ini, saya menyempatkan dihadapan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bahwa kinerja kita tidak boleh turun, justru di era tataran normal baru kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih produktif," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam pengantar Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Yasonna, hal ini dibuktikan dengan Kementerian Hukum dan HAM kembali memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2020, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dipertalankan sejak 2011.

Dalam menyikapi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai macam inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Di bidang keimigrasian, pihaknya telah mengabarkan peraturan tentang lalu lintas orang asing dengan mempermudah prosedur kesehatan bagi setiap orang yang masuk dan transit wilayah Indonesia, ijin tinggal online, serta visa online.

Ijin tinggal online merupakan bentuk mewujudkan digitalisasi dalam pelayanan. Karena itu, dibuat suatu aplikasi, agar pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk menggunakan layanan ijin tinggal. Selain itu juga, menjaga kesehatan pegawai dalam melakukan pelayanan dengan tanpa tatap muka.

Di bidang perasyarakatan, telah memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam bentuk sidang online serta kuangan online. Di bidang Kekayaan Intelektual terdapat peningkatan PNPB dengan melakukan inovasi pendaftaran online LOKVIT (Loket Virtual).

Di bidang peraturan perundang-undangan dilaksanakan rapat pembahasan dengan DPR maupun harmonisasi secara daring. Di bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) sebanyak 73 Satuan Kerja dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) sebanyak 11 Satuan Kerja.

"Ini semua membuktikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap produktif dengan tetap menjunjung nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)". Yasonna menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk kesejahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Adapun, dalam program pembentukan regulasi, telah terselesaikannya perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. DPR RI dan UU Prakeras Pemerintah, 3 RUU telah disahkan.

Program Pemajuan dan Pengakuan Hak Asasi Manusia, telah terselesaikannya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai yakni mengoptimalkan peran dalam penghooratan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Pandemi menyebabkan kemunduran ekonomi (economic atbada), termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masyarakat akar mengembangkan usaha atau mendapatkan kredit perbankan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan sebuah terobosan dengan menghadirkan layanan Perseoran Perorangan yang menjadi satu-satunya dan pertama dunia.

Layanan ini diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan UMKM. Menurut Yasonna, layanan pionir ini diharapkan dapat membantu UMKM yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. "Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian harus berupaya membantu sektor usaha, khususnya UMK, melalui hadirnya bentuk badan hukum baru, yaitu perseoran perorangan yang merupakan sebuah terobosan dan yang pertama di dunia".

Tak hanya itu, melalui layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RR).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEGUDANG PENGHARGAAN YANG DIRAIH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Opini WTP dari BPK
Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

6 LPKA Kemenkumham Raih Predikat Ramah Anak
-LPKA Kelas II Maros, Sulsel;
-LPKA Kelas II Banda Aceh, Aceh;
-LPKA Kelas I Martapura, Kalsel;
-LPKA Kelas II Ternate, Maluku;
-LPKA Kelas I Tangerang, Banten;
-LPKA Kelas II Lombok Tengah, NTB.

Pos Pengaduan HAM di 50 Denominasi Gereja di Manokwari
Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Keja Anggaran Terbaik
Kementerian Hukum dan HAM mendapat Peringkat Kedua Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan nilai 95,97 dari Kementerian Keuangan.

Aplikasi Verasi (Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Secara Elektronik)
Aplikasi Verasi sangat memudahkan proses verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum karena dilakukan secara elektronik dan mendapat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kemendagri-RR.

Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Aplikasi SIPKUMHAM

Manajemen Pemantauan Media

Biro Humas, Hukum dan Kerja sama



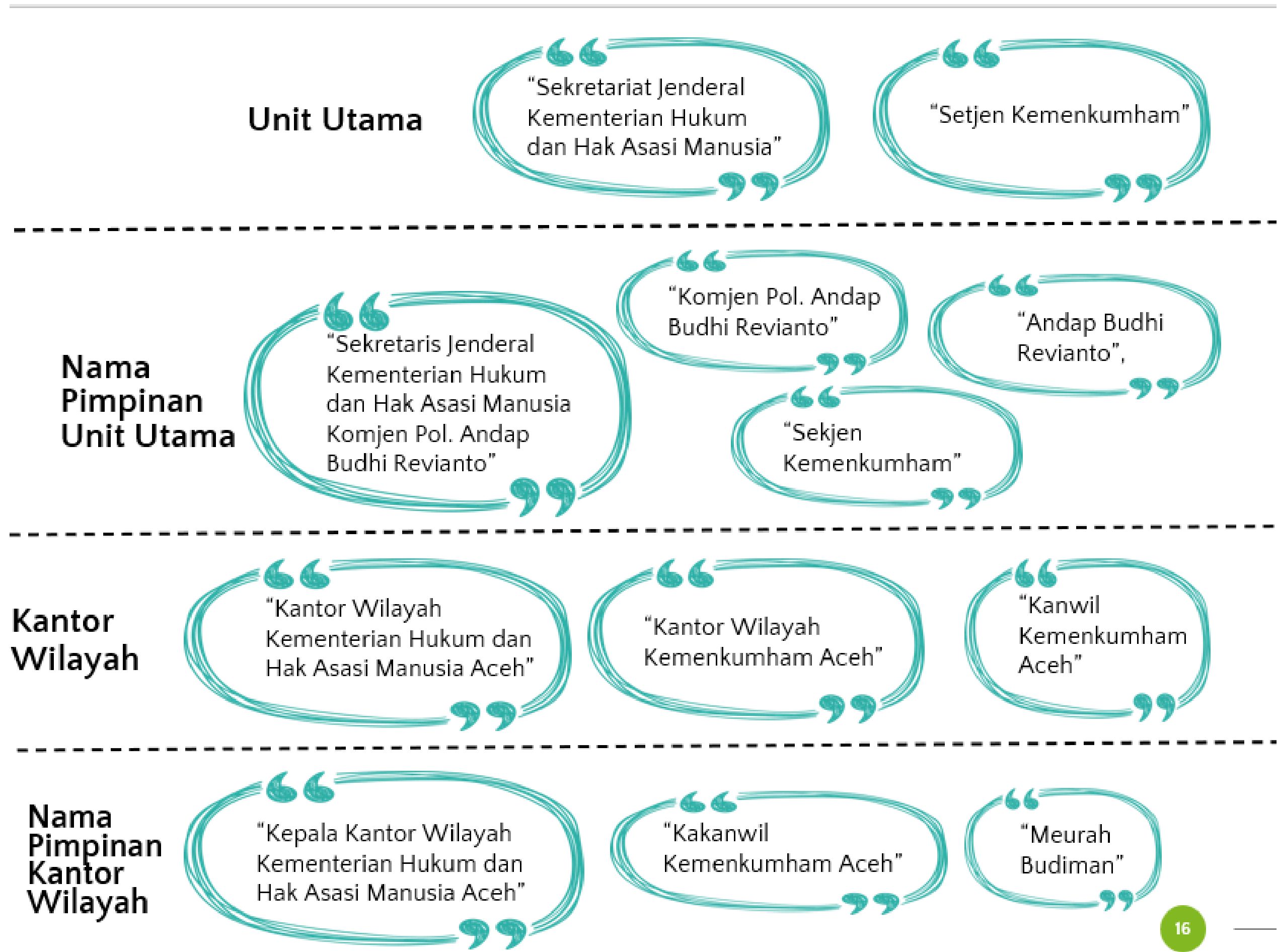
MANAJEMEN PEMANTAUAN MEDIA



- 1** Pemantauan media menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menjaring data berita di media siber
- 2** Media siber yang dipantau merupakan media-media yang sudah terdaftar dalam list media siber Kemenkumham
- 3** Humas Unit Utama dan Kantor Wilayah dapat membuat daftar penambahan media siber secara berkala dan menyampaikan Biro Hukerma

4

Aplikasi pemantauan media mengumpulkan berita media siber berdasarkan kata kunci yang diatur ke dalam aplikasi dengan ketentuan :



- 5 Pemantauan media memberikan informasi :
 - a. topik-topik yang paling disorot tentang Kemenkumham
 - b. isu negatif, positif, dan isu netral tentang Kemenkumham
 - c. media-media siber yang memberitakan tentang Kemenkumham
- 6 Laporan pemantauan media dibuat untuk periode 7 hari (Senin-Minggu)
- 7 Dalam situasi krisis, periode pemantauan media dapat berubah sesuai kepentingan krisis
- 8 Jika satuan kerja tidak memiliki aplikasi pemantauan media atau kerja sama dengan pihak penyedia layanan pemantauan media, kegiatan pemantauan media dapat dilaksanakan secara manual dengan memeriksa pemberitaan tentang Kemenkumham pada media siber.



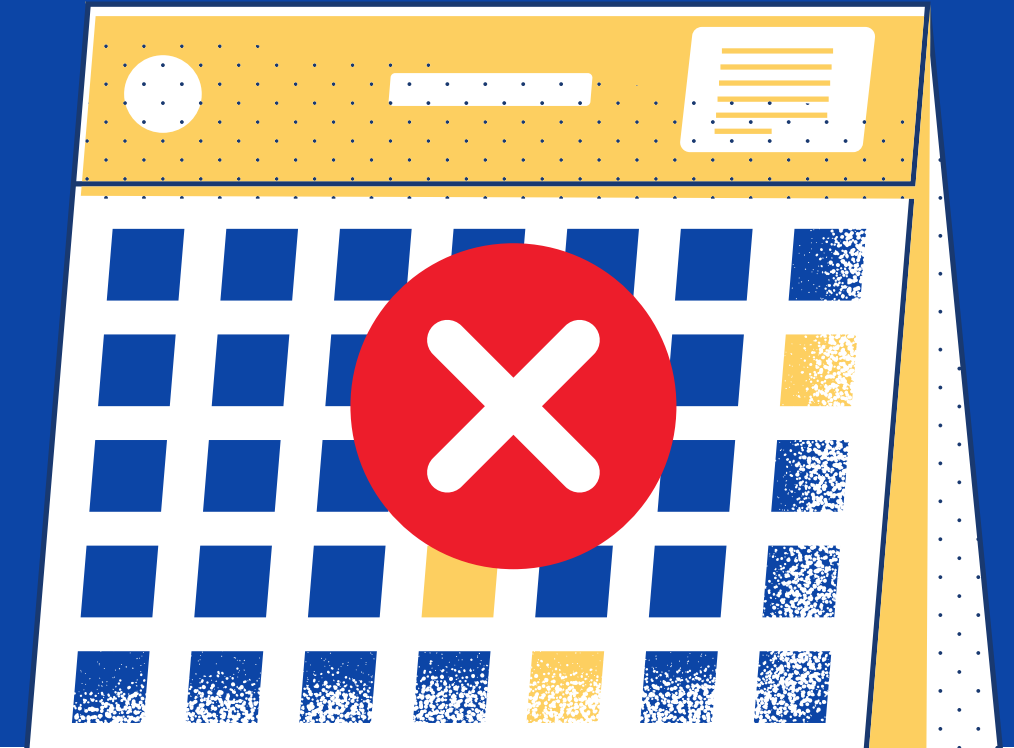
Apabila ada pertanyaan tentang pemantauan media, dapat menghubungi Biro Hukerma

Manajemen Komunikasi Krisis

Biro Humas, Hukum dan Kerja sama



PENANGGAPAN KRISIS



Saat terjadi krisis, humas membuat laporan atensi pimpinan kepada Sekretaris Jenderal pada kesempatan pertama. Laporan atensi berisi :

- kronologi peristiwa
- langkah komunikasi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengatasi krisis komunikasi

SKALA NASIONAL

- Krisis skala lokal terjadi ketika pemberitaan negatif dipublikasikan media cetak nasional dan media siber.
- Tim penanganan krisis : pimpinan Unit Utama, dipimpin humas Unit Utama dengan berkoordinasi bersama Birohukerma dan humas Kanwil, UPT terkait

SKALA LOKAL

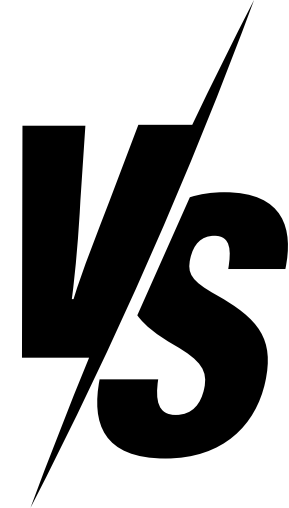
- Krisis skala lokal terjadi ketika pemberitaan negatif dipublikasikan media massa lokal, traffic dan jangkauan tidak luas
- Tim penanganan krisis : humas Kanwil dengan kordinasi humas UPT dan humas Unit Utama terkait

SKALA NASIONAL

The screenshot shows a news article on Kompas.com. The title is "Kronologi dan Dugaan Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang". The article is dated 08/09/2021, 14:54 WIB. The author is Jawahir Gustav Rizal, Rendika Ferri Kurniawan, and Tim Redaksi. The article features a photograph of a damaged building with a barred door. The text describes a fire at Lapas Dewasa Kelas 1 A on Wednesday, September 8, 2021, at 01:45 WIB. It mentions that 41 people died and 72 were injured. The article also includes a section about the cause of the fire, stating it started in Block C. There are also some advertisements and social media sharing options visible.

Berita banyak diterbitkan oleh media nasional.

Tim penanganan krisis : pimpinan Unit Utama, dipimpin humas Unit Utama dengan berkoordinasi bersama Birohukerma dan humas Kanwil, UPT terkait



SKALA LOKAL

The screenshot shows a news article on Mata Pers Indonesia. The title is "Lapas Kelas II B Probolinggo dan Rutan Kelas I Medaeng Surabaya Diduga Jadi Sarang Narkoba, Pungli dan HP, DPP AMI Siap Gelar Aksi Demo Besar-besaran". The article is dated Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB. The article features a photograph of a group of people, some in military uniforms, holding flags and banners. The text describes a suspected drug and gambling hub in Probolinggo and Medaeng, and mentions that DPP AMI is planning a large demonstration. There are also some advertisements and social media sharing options visible.

Berita banyak diterbitkan oleh media lokal, atau/ dan media nasional yang memberitakan hanya 1 saja.

Tim penanganan krisis : humas Kanwil dengan kordinasi humas UPT dan humas Unit Utama terkait

PERMENKUMHAM RI NO 30 TAHUN 2018 TENTANG ORTA KANWIL KEMENKUMHAM



Ka UPT berada di bawah Dirjen/Ka Badan melalui Kadiv. terkait

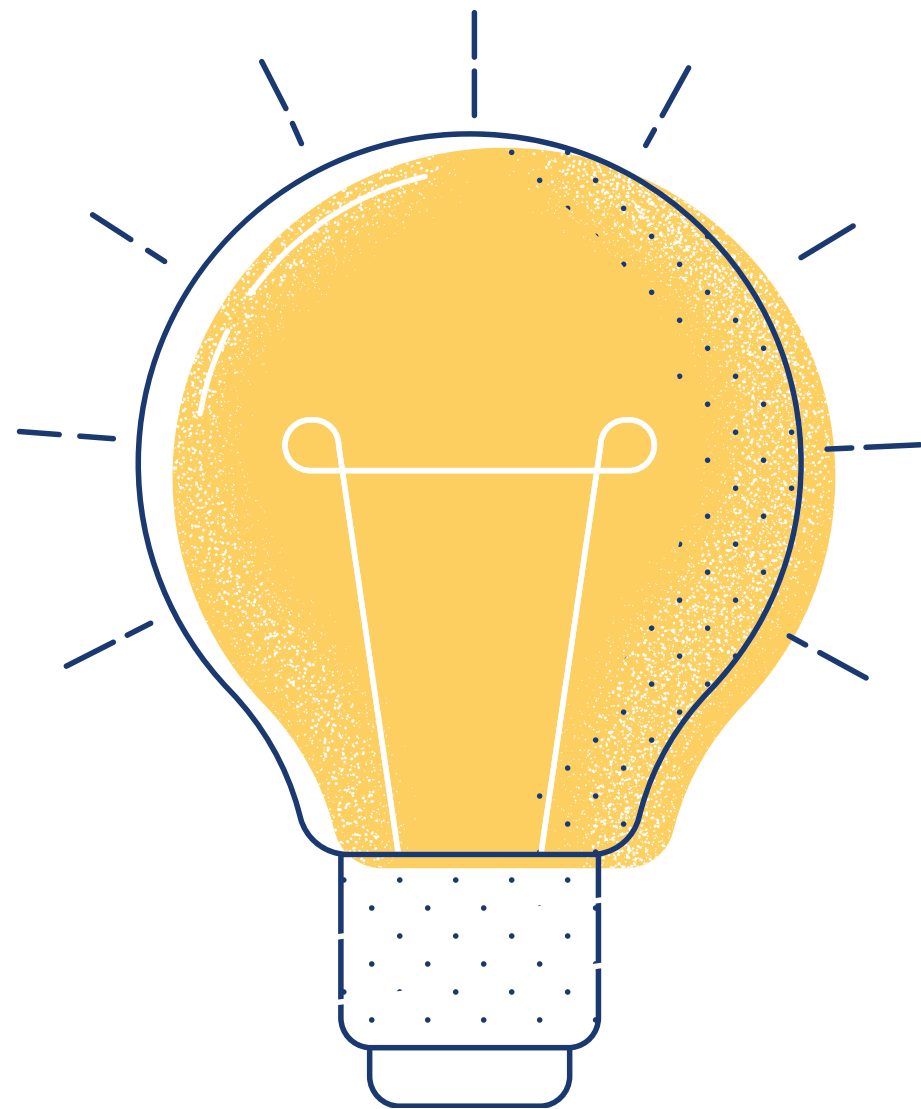


Kakanwil, Kadiv., Kabag., Kabid., Kasubbag., Kasubbid., serta Ka UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi



Ka UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen atau Ka Badan melalui Kadiv. terkait

CARA MITIGASI BERITA NEGATIF



1. Melakukan **publikasi berita positif secara masif** untuk meminimalisir efek dan jangkauan serta menutupi berita negatif
2. Memberikan jawaban atau **klarifikasi** terhadap topik yang menjadi pemberitaan negatif
3. Menggunakan **Hak Jawab, Hak Koreksi**, dan strategi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Manajemen Media Sosial



Biro Humas, Hukum dan Kerja sama

INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DI MEDIA SOSIAL



- 1 Informasi administrasi Kemenkumham (Pendaftaran CPNS/PPPK, Pendaftaran Calon Taruna, PPID, LAPOR dan sebagainya);
- 2 Informasi layanan publik Kemenkumham (Paspur, Hak Cipta, Perseroan Perorangan, Konsultasi Hukum Gratis, dan sebagainya); dan
- 3 Informasi umum (ASEAN, IKN, Pemilu dan isu nasional lainnya).

Content Mapping

Mulai Darimana?

Hari Besar Keagamaan, Nasional & Internasional →

Membuat daftar hari-hari besar keagamaan, nasional maupun internasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenkumham.

- **Hari Besar Keagamaan :**
(Hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Muharram, Kenaikan Isa Almasih, dll)
- **Hari Besar Nasional :**
(Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dll)
- **Hari Besar Internasional :**
(Hari Tari Sedunia, Hari Bumi, Hari Musik Sedunia, HUT ASEAN, dll)

Hari Besar Kemenkumham →

- Hari Bhakti Imigrasi
- Hari Kekayaan Intelektual Sedunia
- Hari Bhakti Pemasyarakatan
- Hari Kementerian Hukum dan HAM
- Hari Inspektorat Jenderal

Kategorikan Konten / Sesuai isu →

- Konten Edukasi
- Quotes Pimpinan
- Pelayanan
- Kuis
- Fun Fact
- Ucapan Hari Besar
- Live Instagram
- Reels
- dll



CONTOH

CONTENT CALENDAR

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
FEB 2024	1	Event	Regulation	Seremonial	Quiz	Reel/Tiktok	
		Services	Event	Regulation	Competition	Tutorial	
		Policy	Services	Event	Challange	Reel/Tiktok	
		Seremonial	Policy	Event	IG live with KOL	Do and Dont's	31



MEMBUAT IDE KONTEN

BRAINSTORMING

Membahas ide dengan tim secara rutin agar menyajikan konten yang segar

RIDING THE WAVE

Membuat konten yang sedang tren atau memanfaatkan isu yang sedang ramai diperbincangkan biasanya akan lebih banyak memiliki engagement ke publik

DIVERSIFIKASI KONTEN

Foto
Video
Infografis
Videografis
Poster
Story
Quiz
Reels
Konten Kolaborasi



CONTOH KONTEN



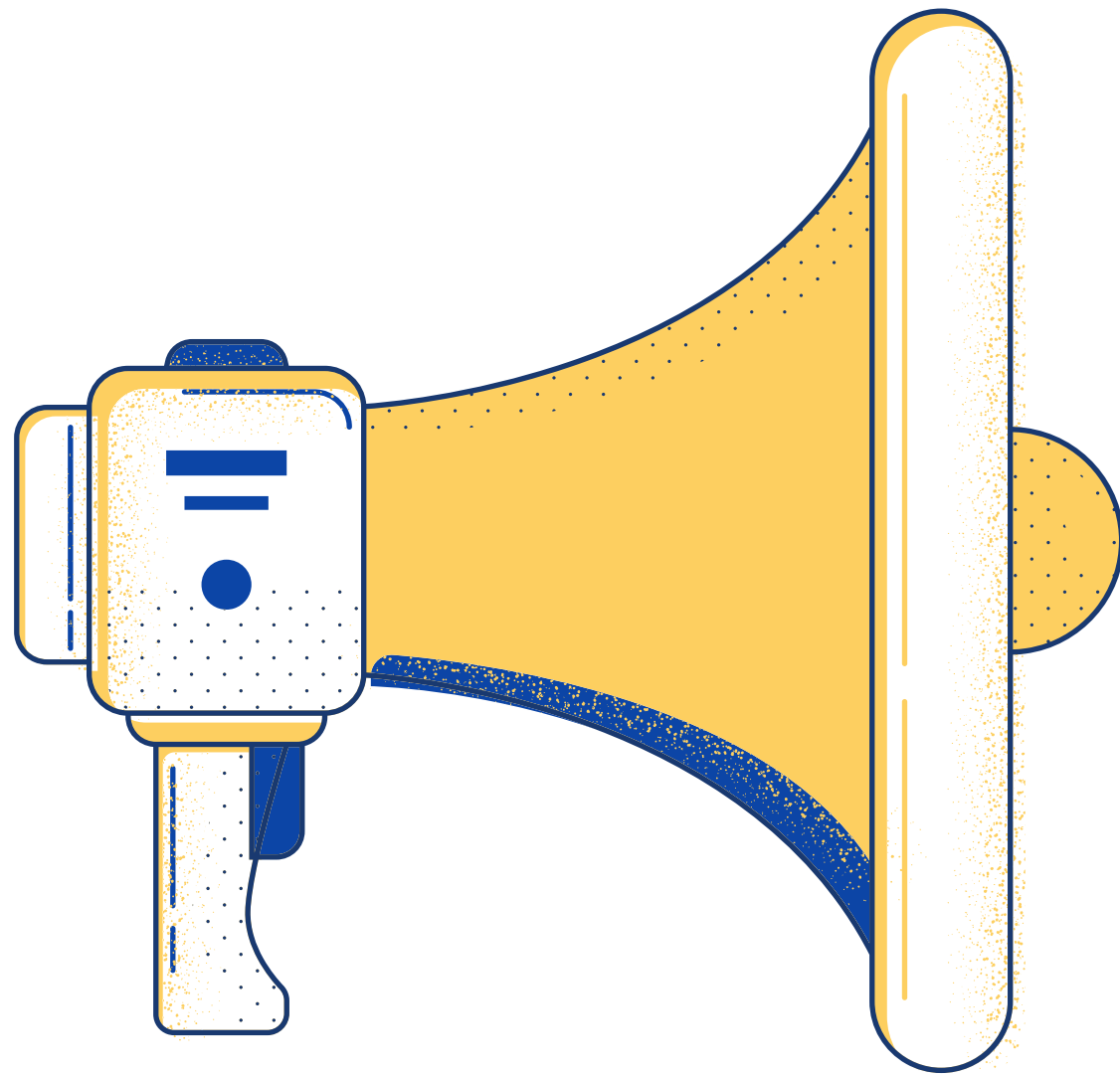
Infografis
Carousel



Video Reels



Quiz
Konten Kolaborasi



Media sosial yang dapat digunakan untuk membangun reputasi dan engagement dengan publik adalah

Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook, dan Youtube

Lakukan penyampaian informasi positif di media sosial secara **konsisten**



Thank
you!

Ada Pertanyaan?



kemenkumhamri



Kemenkumham_RI



KemenkumhamRIofficial



@KemenkumhamRI



@kemenkumhamri